

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) cenderung menurun seiring dengan berkembangnya sektor industri dan jasa, sektor ini tetap menjadi bagian integral dari perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyumbang sekitar 14,3% terhadap PDB nasional (Kementrian Pertanian, 2025). Menyerap sekitar 42,49 juta tenaga kerja atau 28,8% dari total angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2026). Kondisi ini membuktikan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja dan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dari sistem agribisnis. Agribisnis memiliki peran strategis melalui kontribusinya dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan, dan bioenergi, serta sebagai sumber pendapatan, lapangan kerja, dan devisa negara. Peran tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan (Kementerian Pertanian, 2009). Menurut Saragih (2003), agribisnis berpotensi menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi prinsip keberlanjutan, pemerataan, dan kerakyatan. Oleh karena itu, pembangunan sistem dan usaha agribisnis dipandang sebagai pendekatan yang tepat dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.

Pada praktiknya, pengembangan sektor pertanian dan agribisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, teknologi, serta efisiensi dalam proses produksi dan rantai pasok. Kondisi tersebut menuntut adanya dukungan pembiayaan dan investasi yang memadai agar sektor pertanian mampu meningkatkan produktivitas, daya saing, serta nilai tambah produk. Salah satu sumber pembiayaan yang berpotensi mendukung pengembangan sektor pertanian dan agribisnis adalah investasi dari luar negeri.

Seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi global, globalisasi telah mendorong semakin terbukanya perekonomian dunia dan memperkuat interaksi ekonomi antarnegara. Berkurangnya hambatan dalam kegiatan bisnis internasional membuka peluang yang lebih besar bagi masuknya investasi asing ke dalam perekonomian domestik, termasuk ke Indonesia. Investasi memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam menyediakan tambahan modal dan mendorong aktivitas produksi.

Salah satu bentuk investasi asing adalah investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI), yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai penanaman modal asing (PMA). Menurut UNCTAD (2015), PMA merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu negara ke perusahaan di negara lain dengan tujuan memperoleh kendali atas kegiatan operasional perusahaan tersebut. PMA umumnya bersifat jangka panjang dan direalisasikan melalui penanaman modal pada aset-aset produktif, seperti pendirian pabrik, penguasaan lahan, serta penyediaan peralatan dan sarana produksi. Keberadaan PMA di negara berkembang berpotensi memberikan kontribusi positif melalui pemenuhan kebutuhan modal, transfer teknologi, peningkatan kemampuan manajerial, serta penciptaan lapangan kerja.

Masuknya PMA ke sektor pertanian dan agribisnis diharapkan mampu memperkuat kinerja sektor tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa investasi asing memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, termasuk pertanian, melalui peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok (Putri *et al.*, 2022). Sikandar *et al.* (2021) juga menyatakan bahwa investasi asing berperan dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Dengan demikian, PMA berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian nasional.

Meskipun memiliki potensi yang besar, minat investor asing terhadap sektor pertanian di Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan sektor lainnya. Karakteristik sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi alam, fluktuasi harga komoditas, serta tingginya risiko produksi sering kali membuat sektor ini dipersepsikan kurang menarik bagi investor. Pasaribu (2010) menunjukkan bahwa lembaga keuangan dan investor cenderung memandang sektor pertanian sebagai

sektor dengan tingkat risiko yang tinggi, sehingga belum menjadi prioritas utama dalam penanaman modal asing. Padahal, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang tinggi dan tingkat konsumsi yang terus meningkat, yang seharusnya dapat menjadi daya tarik bagi investor asing apabila didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil dan iklim investasi yang kondusif (Putriyanti, 2022).

Gambaran empiris mengenai perkembangan penanaman modal asing dapat diperoleh melalui pemaparan dinamika PMA di Indonesia, baik secara nasional maupun pada sektor pertanian. Meskipun sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan pengembangan agribisnis, besaran aliran PMA yang masuk ke sektor ini masih perlu dikaji. Oleh karena itu, penyajian data PMA menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana sektor pertanian mampu menarik investasi asing dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Berikut data penanaman modal asing nasional dan penanaman modal asing pada sektor pertanian di Indonesia selama periode 2010-2025.

Tabel 1. Perkembangan penanaman modal asing serta persentase serapan pada sektor pertanian Tahun 2010-2025

Tahun	PMA (Miliar Rupiah)		(%)
	Total	Pertanian	
2010	16.214.772	833.355	5,13
2011	19.474.532	1.263.949	6,5
2012	24.564.670	1.677.621	6,78
2013	28.616.270	1.655.473	5,78
2014	28.529.699	2.326.160	8,15
2015	29.275.941	2.219.221	7,58
2016	28.964.075	1.759.548	6,07
2017	32.239.752	1.700.191	5,27
2018	29.307.908	1.788.732	6,1
2019	28.208.761	1.037.285	3,6
2020	28.666.272	1.274.992	4,44
2021	31.093.069	1.009.190	3,24
2022	45.604.963	1.919.854	4,1
2023	50.267.512	2.067.352	4,11
2024	46.384.916	2.130.596	4,6
2025	40.286.339	1.224.710	3,04

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), 2025.

Data pada Tabel 1 menunjukkan perbedaan pola yang cukup kontras antara perkembangan penanaman modal asing (PMA) secara nasional dan PMA pada

sektor pertanian. Secara agregat, PMA total Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Pada tahun 2010, PMA total tercatat sebesar 16.214 triliun dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 50.267 triliun, sebelum mengalami penurunan pada tahun 2024 dan kembali melemah pada 2025 menjadi 40.286 triliun. Lonjakan PMA nasional yang signifikan terutama terjadi setelah tahun 2021, yang mencerminkan meningkatnya daya tarik Indonesia bagi investor asing secara makro.

Berbeda dengan PMA total, perkembangan investasi asing di sektor pertanian menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2010, PMA sektor pertanian tercatat sebesar 833 triliun dan kemudian meningkat cukup pesat hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2014 sebesar 2.326 triliun. Namun, setelah tahun tersebut, PMA pertanian tidak menunjukkan peningkatan yang stabil. Nilainya cenderung menurun pada periode 2015-2017, kembali melemah tajam pada 2019 menjadi 1.037 triliun, kemudian mengalami pemulihan terbatas pada periode 2022-2024 sebelum kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 1.224 triliun.

Kondisi tersebut terlihat juga pada persentase kontribusi PMA sektor pertanian terhadap PMA total. Pada awal periode pengamatan, kontribusi PMA pertanian sebesar 5,13% pada tahun 2010 dan sempat meningkat hingga 8,15% pada tahun 2014. Namun, setelah itu kontribusinya cenderung menurun, bahkan berada di bawah 5% sejak tahun 2019 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PMA nasional tidak diikuti secara proporsional oleh sektor pertanian. Meskipun secara nominal PMA pertanian masih bertambah pada beberapa tahun tertentu, laju pertumbuhannya relatif tertinggal dibandingkan sektor lain, sehingga posisi sektor pertanian dalam struktur investasi asing nasional semakin melemah.

Ketidakseimbangan antara peningkatan PMA nasional dan rendahnya penerimaan PMA pada sektor pertanian menandakan bahwa kondisi makroekonomi perlu ditelaah lebih jauh. Dalam kajian ekonomi pembangunan, stabilitas makro menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah produk domestik bruto (PDB). Investor asing cenderung lebih tertarik pada negara yang tingkat pertumbuhan PDB lebih tinggi, karena menunjukkan permintaan potensial bagi produk mereka (Choong *et al.*, 2010). Pertumbuhan PDB

akan menjadi *proxy* yang menggambarkan besarnya ukuran pasar potensial suatu negara (Saleem *et al.*, 2018). Semakin besar ukuran pasar di suatu negara tuan rumah yang dicirikan dengan PDB, maka akan semakin tinggi arus masuk PMA (Uddin dan Boateng, 2011).

Oleh karena itu, penting untuk melihat dinamika PDB nasional serta PDB sektor pertanian sebagai dasar dalam memahami bagaimana keduanya berkaitan dengan perkembangan investasi asing. Dengan demikian, tabel berikut menyajikan data PDB Indonesia dan PDB sektor pertanian pada periode 2010-2025.

Tabel 2. Produk domestik bruto Indonesia dan Produk domestik bruto sektor pertanian Tahun 2010-2025

Tahun	PDB Indonesia	PDB Sektor Pertanian
2010	6.864.133	956.120
2011	7.287.635	993.857
2012	7.727.083	1.039.441
2013	8.156.498	1.083.141
2014	8.564.867	1.129.053
2015	8.982.517	1.171.446
2016	9.434.613	1.210.956
2017	9.912.928	1.258.376
2018	10,425.852	1.307.253
2019	10.949.155	1.354.399
2020	10.722.999	1.378.399
2021	11.120.060	1.404.191
2022	11.710.223	1.435.853
2023	12.301.475	1.454.602
2024	12.920.282	1.464.331
2025	13.580.524	1.542.447

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia mengalami pola peningkatan yang relatif konsisten selama periode 2010-2025. Pada tahun 2010, PDB nasional tercatat sebesar Rp 6.864 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp 13.580 triliun pada tahun 2025. Perkembangan ini menandakan ekspansi ekonomi nasional yang berlangsung secara berkelanjutan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2020, ketika pandemi *Covid-19* menyebabkan PDB turun dari Rp 10.949 triliun pada 2019 menjadi Rp 10.722 triliun. Namun, pada tahun-tahun berikutnya perekonomian kembali menunjukkan perbaikan hingga 2025.

Sementara itu, PDB sektor pertanian juga menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap selama periode 2010-2025. Pada tahun 2010, PDB sektor pertanian tercatat sebesar Rp 956 triliun dan meningkat menjadi Rp 1.542 triliun pada tahun 2025. Meskipun laju pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan PDB nasional, sektor pertanian tetap menunjukkan stabilitas yang cukup baik. Bahkan pada tahun 2020, ketika PDB nasional mengalami kontraksi, PDB sektor pertanian masih meningkat dari Rp 1.354 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 1.378 triliun. Kondisi ini menunjukkan peran sektor pertanian sebagai sektor yang relatif tahan terhadap guncangan ekonomi, khususnya pada masa pandemi.

Secara keseluruhan, selisih antara PDB nasional dan PDB sektor pertanian cenderung semakin melebar selama periode 2010-2025, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor non-pertanian berlangsung lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Meskipun PDB sektor pertanian terus mengalami peningkatan dan berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, khususnya pada periode krisis, kontribusinya secara relatif dalam struktur PDB nasional menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini sejalan dengan gambaran pada Tabel 1, di mana arus penanaman modal asing (PMA) masih lebih banyak terkonsentrasi pada sektor-sektor di luar pertanian dibandingkan sektor pertanian.

Selain PDB, indikator makroekonomi lain seperti suku bunga juga berperan penting dalam memengaruhi aliran PMA. Peningkatan tingkat suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman yang harus ditanggung investor, sehingga menurunkan daya tarik investasi, khususnya pada sektor riil yang bersifat padat modal. Hal ini sejalan dengan teori permintaan investasi yang dikemukakan oleh Mankiw (2009), yang menjelaskan bahwa keputusan investasi akan dilakukan apabila tingkat pengembalian yang diharapkan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga. Jhingan (2004) juga menegaskan bahwa suku bunga merupakan salah satu variabel utama dalam teori penentuan investasi, di mana investor cenderung menghindari negara dengan tingkat suku bunga tinggi karena tingginya *opportunity cost modal* (Suprijati *et al.*, 2019).

Sejalan dengan kerangka teori tersebut, data menunjukkan bahwa suku bunga acuan di Indonesia berada pada level tinggi dan mencapai sekitar 7,42-7,58 persen

pada periode 2013 hingga 2015. Kondisi ini dipertahankan oleh Bank Indonesia sebagai respons terhadap meningkatnya inflasi pasca kenaikan harga BBM pada akhir 2014 serta tekanan depresiasi nilai tukar akibat ketidakpastian global (CNN Indonesia, 2015). Kebijakan pengetatan moneter tersebut merefleksikan upaya menjaga stabilitas makroekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan biaya modal bagi pelaku usaha.

Sementara itu, pada periode terbaru, tingkat suku bunga acuan Indonesia pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,75 persen hingga 5,75 persen, yang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan penyesuaian kebijakan moneter menuju tingkat yang lebih moderat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi domestik. Dalam investasi, khususnya PMA di sektor pertanian yang bersifat jangka panjang dan padat modal, perubahan tingkat suku bunga tetap menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertimbangan investor dalam merealisasikan investasi.

Selain suku bunga, inflasi juga merupakan indikator makroekonomi yang berpengaruh terhadap masuknya investasi asing langsung. Ahmed dan Gabriel (2012) menyatakan bahwa inflasi merupakan salah satu variabel penentu aliran PMA. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil sering dipandang sebagai indikator ketidakpastian ekonomi karena menandakan adanya gangguan pada stabilitas harga dan melemahnya kemampuan otoritas dalam menjaga keseimbangan makroekonomi (Cookey & Eniekezimene, 2020). Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi, menurunkan daya beli, serta mengurangi kepastian keuntungan, sehingga berdampak negatif terhadap minat investor asing (Buchanan & Rishi, 2012; Kumari & Sharma, 2017).

Tetapi, inflasi yang terlalu rendah juga tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi yang sehat. Lane (2020) menjelaskan bahwa inflasi yang berada di bawah target dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko deflasi, menunda konsumsi dan investasi, serta memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas inflasi pada tingkat yang moderat dan terkendali lebih mencerminkan kondisi makroekonomi yang kondusif bagi investasi.

Perkembangan inflasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang beragam sepanjang periode penelitian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada

tahun 2013-2014 inflasi berada pada level relatif tinggi, bahkan mencapai di atas 8 persen pada beberapa triwulan, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM dan tekanan nilai tukar. Sebaliknya, pada tahun 2020 inflasi berada pada kisaran yang jauh lebih rendah, sekitar 1-2 persen, seiring dengan kontraksi ekonomi akibat pandemi *Covid-19* dan melemahnya permintaan domestik. Sementara itu, pada periode terbaru, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2025 berada pada kisaran 0,57 persen hingga 2,83 persen, yang menunjukkan bahwa inflasi cenderung berada pada level yang relatif moderat dan terkendali. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa baik inflasi yang terlalu tinggi maupun yang terlalu rendah sama-sama mempresentasikan tekanan makroekonomi yang berpotensi memengaruhi keputusan investasi, termasuk aliran PMA.

Nilai tukar juga merupakan salah satu faktor makroekonomi yang memengaruhi keputusan investasi asing. Perubahan jumlah uang beredar dapat menimbulkan ketidakpastian nilai tukar yang selanjutnya berdampak pada arus penanaman modal asing (PMA) (Russ, 2007). Secara teoritis, nilai tukar riil memengaruhi pemilihan lokasi fasilitas produksi oleh perusahaan multinasional, meskipun hubungan antara nilai tukar dan PMA dalam berbagai model menunjukkan hasil yang beragam dan cenderung ambigu. Depresiasi mata uang negara tuan rumah dapat meningkatkan arus masuk PMA karena meningkatkan kekayaan relatif investor asing serta menurunkan biaya input yang dibiayai dalam mata uang negara asal, sehingga memungkinkan pembiayaan investasi yang lebih besar secara internal (Phillips dan Esfahani, 2008). Namun, stabilitas sistem nilai tukar tetap menjadi faktor penting, karena investor cenderung menghindari negara dengan volatilitas nilai tukar yang tinggi atau pelemahan mata uang yang berlebihan (Zeeshan, 2022).

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat selama periode 2022-2025 menunjukkan tekanan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia, Rupiah cenderung berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan periode awal penelitian dan pada akhir 2025 mendekati Rp17.000 per USD. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya tekanan eksternal serta dinamika global yang memengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik. Meskipun secara teoritis depresiasi dapat meningkatkan daya tarik investasi, pelemahan yang berkelanjutan

dan volatilitas yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko nilai tukar dan memengaruhi keputusan PMA di Indonesia.

Selain indikator makroekonomi, keputusan investor asing juga dipengaruhi oleh faktor struktural yang menggambarkan karakteristik dasar suatu negara sebagai lokasi investasi. Faktor struktural berkaitan dengan kondisi pasar tenaga kerja maupun kualitas institusi yang dapat mempengaruhi biaya, efisiensi, dan kepastian dalam berinvestasi. Salah satu faktor struktural yang banyak menjadi perhatian investor adalah kondisi pasar tenaga kerja, khususnya tingkat upah sebagai komponen utama dari biaya produksi.

Tingkat upah tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan lokasi penanaman modal. Negara dengan tingkat upah relatif lebih rendah cenderung lebih menarik bagi investor karena mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha (Ritonga & Syafri, 2023). Sebaliknya, kenaikan upah berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga barang dan jasa menjadi relatif lebih mahal dibandingkan negara lain. Biasanya, tingkat upah direpresentasikan melalui upah minimum provinsi (UMP) sebagai indikator kondisi pasar tenaga kerja secara umum.

Perkembangan UMP di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2010 rata-rata UMP sebesar Rp908.824 dan meningkat menjadi Rp3.315.762 pada tahun 2025. Peningkatan ini menggambarkan adanya perubahan struktur biaya tenaga kerja yang perlu dipertimbangkan oleh investor. Dalam investasi di sektor pertanian, dinamika UMP menjadi relevan karena dapat memengaruhi efisiensi biaya produksi. Di satu sisi, kenaikan UMP dapat meningkatkan beban biaya tenaga kerja, namun di sisi lain juga dapat menandakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, UMP menjadi salah satu variabel penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan penanaman modal asing pada sektor pertanian.

Selain kondisi pasar tenaga kerja, faktor struktural lainnya yang turut mempengaruhi keputusan investasi asing adalah kualitas institusi. Kualitas institusi menggambarkan tingkat kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas tata kelola yang berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas institusi adalah

corruption perceptions index (CPI), yang menggambarkan persepsi terhadap tingkat korupsi di sektor publik. Menurut *Transparency International* (1996), korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian serta meningkatkan risiko dalam kegiatan ekonomi.

Tingkat korupsi yang tinggi dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efisiensi usaha, sehingga menurunkan minat investor asing. Habib & Zurawicki (2001) menyatakan bahwa investor asing cenderung lebih sensitif terhadap risiko yang ditimbulkan oleh korupsi dibandingkan investor domestik. Selain itu, Drabek & Payne (2002) menjelaskan bahwa rendahnya transparansi, termasuk tingginya tingkat korupsi, dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan pada akhirnya mengurangi aliran investasi asing. Sejalan dengan itu, Quazi (2014) menemukan bahwa peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi berpotensi mendorong peningkatan arus masuk investasi asing.

Skor indeks persepsi korupsi (IPK) berada pada rentang 0-100, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah serta kualitas tata kelola yang lebih baik, sedangkan skor yang lebih rendah menandakan persepsi korupsi yang lebih tinggi dan lemahnya institusi publik. Perkembangan IPK di Indonesia menunjukkan adanya perubahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data *Transparency International*, skor IPK Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai 40 pada tahun 2019. Namun, pada periode setelahnya, nilai IPK bergerak secara fluktuatif, yaitu sebesar 37 pada tahun 2020, meningkat menjadi 38 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 34 pada tahun 2022 dan relatif tidak berubah pada tahun 2023, serta kembali berada pada kisaran 34-37 pada periode berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas institusi belum berlangsung secara konsisten dan masih menghadapi berbagai tantangan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji pengaruh berbagai faktor ekonomi terhadap aliran penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, namun menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian oleh Tambunan (2013) menemukan bahwa variabel-variabel ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PMA, dengan ukuran ekonomi sebagai faktor dominan. Sementara itu, Lembong dan

Nugroho (2012) menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PMA.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan indikator makroekonomi belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika aliran investasi asing. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada PMA secara agregat nasional, sehingga belum mampu menangkap karakteristik spesifik tiap sektor. Padahal, setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk sektor pertanian yang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan biaya produksi, kondisi tenaga kerja, serta stabilitas lingkungan usaha.

Di sisi lain, penelitian terdahulu juga cenderung belum mengintegrasikan faktor non-makroekonomi, seperti kondisi pasar tenaga kerja dan kualitas institusi, dalam satu kerangka analisis yang utuh. Padahal, dalam praktiknya, keputusan investor tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi makro, tetapi juga oleh tingkat efisiensi biaya tenaga kerja serta tingkat korupsi yang mencerminkan risiko dan kepastian berusaha di suatu negara.

Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan, baik dalam cakupan variabel yang digunakan maupun dalam fokus analisis yang masih bersifat agregat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih spesifik determinan penanaman modal asing (PMA) pada sektor pertanian di Indonesia, melalui kajian indikator makroekonomi dan faktor struktural dalam satu kerangka analisis yang lebih komprehensif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh produk domestik bruto (PDB), suku bunga, inflasi, upah minimum provinsi (UMP), serta indeks persepsi korupsi (IPK) terhadap penanaman modal asing (PMA) pada sektor pertanian di Indonesia periode 2010-2025?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh produk domestik bruto (PDB), suku bunga, inflasi, upah minimum provinsi (UMP), serta indeks persepsi korupsi (IPK) terhadap penanaman modal asing (PMA) pada sektor pertanian di Indonesia periode 2010-2025.

1.4. Manfaat

1. Bagi pemerintah, memberikan masukan empiris mengenai indikator makroekonomi dan faktor struktural yang memengaruhi minat investor asing di sektor pertanian, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan investasi dan strategi penguatan sektor pertanian.
2. Bagi pelaku sektor pertanian, menjadi sumber informasi mengenai kondisi ekonomi makro dan faktor struktural yang berpotensi memengaruhi masuknya penanaman modal asing (PMA), sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi pengembangan usaha dan meningkatkan daya tarik sektor pertanian.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta memberikan tambahan informasi dalam pengembangan penelitian mengenai penanaman modal asing (PMA) khususnya pada sektor pertanian.